

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REGULASI TRANSPORTASI  
SEPEDA MOTOR BERBASIS APLIKASI ONLINE**

**SKRIPSI**

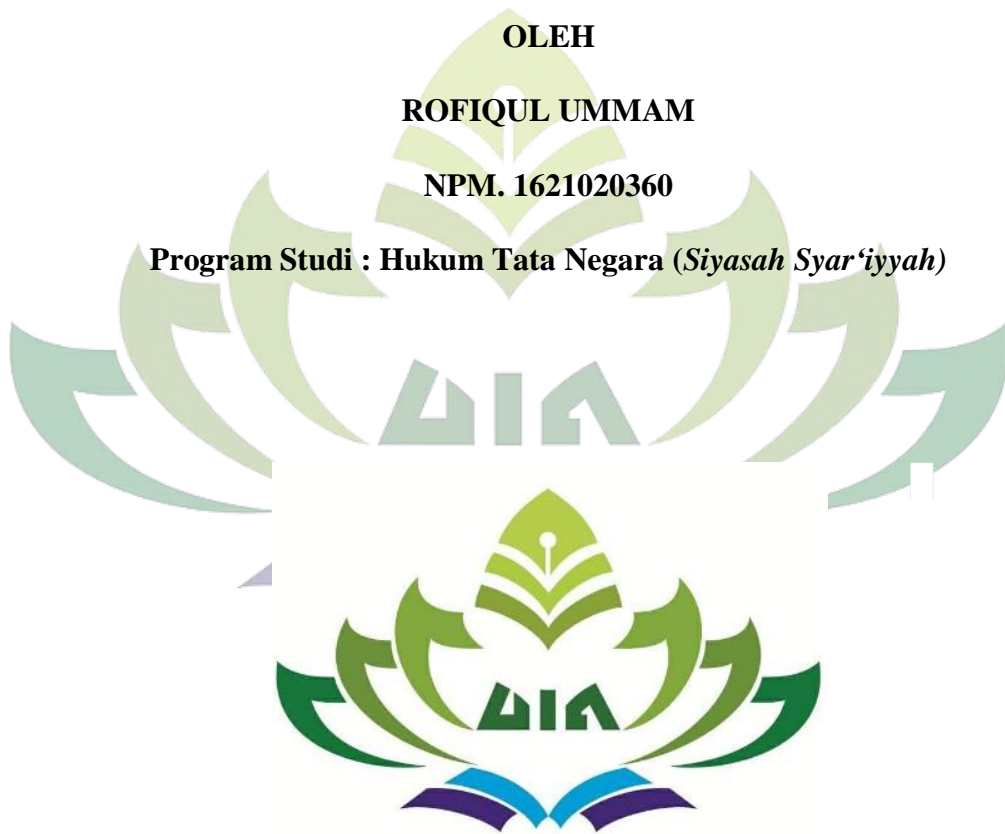
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu *Siyāsah*  
*Syar'iyah*

**OLEH**

**ROFIQUL UMMAM**

**NPM. 1621020360**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REGULASI TRANSPORTASI  
SEPEDA MOTOR BERBASIS APLIKASI ONLINE**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu *Siyāsah*  
*Syar‘iyyah*

**OLEH**

**ROFIQUL UMMAM**

**NPM. 1621020360**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Shar‘iyyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, MA.**

**Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**FAKULTAS SYARI’AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. Namun seiring perkembangan zaman, baik dalam bidang teknologi, informasi serta komunikasi, memberikan banyak dampak positif, khususnya kemajuan transportasi, salah satunya adalah transportasi sepeda motor yang digunakan dengan aplikasi online atau yang biasa disebut ojek online. Munculnya ojek online saat ini pro dan kontra masih terus terjadi terhadap ojek online tersebut, yang dimana dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni sepeda motor tidak dikategorikan fungsinya sebagai kendaraan bermotor umum. Sementara dengan keluarnya regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online yang dalam hal ini yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 memberikan ketidakpastian hukum mengenai pengkategorian sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum atau tidak. Permasalahan tersebut merumuskan masalah yakni, Bagaimana regulasi terhadap transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. Tujuan dalam penelitian ini ialah tidak lain untuk menajaki regulasi tentang transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, serta untuk menerangkan tinjauan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. Penelitian dalam permasalahan ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat *Deskriptif Analitik* dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online yang dalam hal ini yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 bertentangan dengan Peraturan yang berada di atasnya yakni dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pengkategorian fungsi sepeda motor. Islam juga memandang sepeda motor dapat dipergunakan untuk kemaslahatan yang dimana dalam membentuk aturan tersebut sesuai dengan kajian *Al-sulthah al-tasyri'iyah* serta *maslahah mursalah* sebagai dasar, serta mengutamakan keselamatan serta keamanan dalam berkendara, namun tetap sesuai dengan hierarki sebagaimana yang terkandung didalam al-Qur'an.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rofiqul Ummam

NPM : 1621020360

Program Studi : *Siyāsah Syar‘iyyah*

Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020  
Penulis,

Rofiqul Ummam  
NPM. 1621020360





**KEMEN TERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama : Rofiqul Ummam  
NPM : 1621020360  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Iskandar Syukur, MA.**  
**NIP. 196603301992031002**

**Pembimbing II**

**Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197512302003121002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003122009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


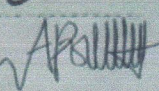

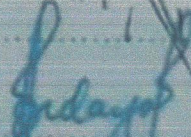
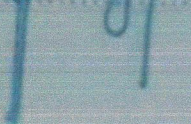
*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online"** disusun oleh Rofiqul Ummam, NPM: 1621020360, Program Studi *Siyāṣah Syar'iyah*. Telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020.

**Tim Penguji**

Ketua	:	Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
Sekretaris	:	Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
Penguji Utama	:	Eti Karini, S.H., M.Hum.
Penguji Pendamping I	:	Dr. Iskandar Syukur, MA.
Penguji Pendamping II	:	Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

()  
()  
()  
()  
()

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

  
**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),  
dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang  
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya),  
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian  
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisa' (4) : 59)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mempersembahkan skripsi yang sederhana namun penuh perjuangan ini kepada :

1. Ayah Drs. H. Suhabsi M.Pd.I. dan Ibu tercinta Dra. Hj. Ricanawati, yang selalu melimpahkan do'a didalam ibadahmu dan selalu mendukung penuh, menasehati serta menyemangati penulis dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Putri Yulia Dzati Iffah, S.Si dan kakak Suri Gusmi Yanti Fitriyyah A.Md.Keb, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Anggini Yulanda Agustria, S.H. yang selalu menemani, menyemangati, memotivasi serta mendukung dalam menempuh hingga menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).
4. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2016, terkhusus untuk kelas H program studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*) yang telah bersama-sama menempuh pendidikan serta menimba ilmu.
5. Teman-teman Paskibra SMK Negeri 5 Bandar Lampung yang selalu memberi semangat serta do'a.
6. Teman-teman 06-01 Rumah Belakang Racing Team yang telah memberi semangat dan menghibur.



7. Teman-teman kelompok dari Kuliah *Ta'aruf*, Praktik Peradilan Semu, Praktik Pengamalan Ibadah, serta Kuliah Kerja Nyata yang telah sama-sama menyelesaikan salah satu kegiatan akademik.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sebagai tempat yang tidak dapat penulis lupakan dalam menimba ilmu pengetahuan serta pengamalannya.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Rofiqul Ummam, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 1998, Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. H. Suhabsi M.Pd.I. dan Dra. Hj Ricanawati. Pendidikan dimulai dari Raudlatul Athfal Islami Tiuh Balak Pasar dan selesai pada tahun 2004, melanjutkan ke SD Negeri Tiuh Balak Pasar dan selesai tahun 2009, pindah ke SD Negeri 1 Kedaton pada tahun 2009 dan selesai tahun 2010, melanjutkan ke MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan selesai tahun 2013, melanjutkan ke SMK Negeri 5 Bandar Lampung dan selesai tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah) dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di kegiatan intra yakni unit kegiatan mahasiswa resimen mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020  
Yang Membuat,

Rofiqul Ummam



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online” dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1).

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan semua pihak. Oleh karena itu, tidak lupa dihaturkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. dan bapak Hervin Yonki P, M.H.I. selaku ketua dan sekretaris program studi *Siyāsah Syar'īyyah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, MA, selaku dosen pembimbing I dan bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku dosen pembimbing II.

5. Segenap civitas akademika, dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Kepala serta Staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Komandan, wakil serta jajaran staff UKM Resimen Mahasiswa Batalyon 202/Harimau Sumatera UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu kedisiplinan dan ilmu-ilmu lain yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman mahasiswa serta mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, terkhusus pada jurusan *Siyāsah Syar'iyah* angkatan 2016
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah Swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar akan kekurangan dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020

Rofiqul Ummam  
NPM. 1621020360



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	11
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Peneitian .....	12
G. Signifikansi Penelitian .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	
1. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	19
2. <i>Maslahah al-Mursalah</i> .....	29
3. Transportasi Menurut Islam .....	33
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	36
B. Tinjauan Pustaka .....	40
 <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK DAN DESKRIPSI DATA PENELITIAN</b>	
A. Regulasi Menurut Hukum .....	43
B. Perkembangan Sepeda Motor Sebagai Alat Transportasi .....	46
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	49
D. Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online .....	
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat .....	54
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi .....	56

**BAB IV ANALISIS REGULASI TRANSPORTASI SEPEDA  
MOTOR BERBASIS APLIKASI ONLINE MENURUT  
HUKUM ISLAM**

A. Analisis Terhadap Regulasi Tentang Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online .....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Regulasi Tentang Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online .....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

Lampiran 1  
Lampiran 2







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu bagian yang penting karena judul sebagai gambaran dari isi. Adanya penegasan judul untuk mengharapkan tidak timbulnya pemahaman yang berbeda dengan apa yang peneliti maksudkan, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak maupun berfikir di dalam suatu penelitian. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online. Judul tersebut terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang peneliti buat yakni :

1. “Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.”<sup>1</sup>
2. “Hukum Islam yaitu suatu kaidah, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat al-Qur`an, hadits Nabi Saw, pendapat sahabat dan *tabi'in* maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.157.

<sup>2</sup>Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), h.575.

3. “Regulasi adalah Pengaturan.”<sup>3</sup>
4. “Transportasi merupakan pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.”<sup>4</sup>
5. “Sepeda motor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran.”<sup>5</sup>
6. “Berbasis merupakan mempunyai basis atau berdasarkan.”<sup>6</sup>
7. “Aplikasi merupakan penggunaan, penerapan, lamaran maupun tambahan.”<sup>7</sup>
8. “Online merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.”<sup>8</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas yang dimaksud dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi Transportasi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi Online adalah penyelidikan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari al-Qur`an dan Hadits terhadap pengaturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang dalam Negara Indonesia tentang angkutan yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik dengan

---

<sup>3</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1275.

<sup>4</sup>*Ibid.* h.1545.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* ...., h. 144.

<sup>7</sup>*Ibid.* h.85.

<sup>8</sup>*Ibid.* h.1020.



menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk memilih judul tersebut adalah :

1. Ingin mengkaji lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.
2. Ingin lebih menguasai terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.
3. Pembahasan ini sangat relevan dengan salah satu pekerjaan sampingan saya yakni transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman yang begitu cepat dan daya saing yang semakin tinggi dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Daya saing bukan hanya sesama rakyat Indonesia saja, tetapi sudah meluas hingga antar Negara-Negara ASEAN yang mulai masuk ke Indonesia.

“Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring waktu. Perkembangan ini dipicu oleh keberadaan teknologi komputer dan internet. Teknologi komputer dan internet pada dasarnya bertujuan untuk memberi kemudahan bagi manusia dari tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.”<sup>9</sup>

Inovasi model bisnis baru berkembang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Salah satu inovasi model bisnis baru tersebut ialah transportasi. Transportasi di Indonesia merupakan hal terpenting dalam mobilitas sehari-hari, termasuk dalam pemberian jasa yang

---

<sup>9</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2015), h.361.

dilakukan dalam bertransportasi. Jasa transportasi juga mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Model bisnis baru yang dalam hal ini ialah transportasi, menggunakan kecanggihan aplikasi dalam dunia internet untuk mempermudah dalam bermobilitas. Perusahaan yang berkembang pesat dalam bisnis baru ini di Indonesia adalah Gojek dan Grab. Terdapat armada sepeda motor dalam perusahaan tersebut, yang dimana dalam pelayanannya konsumen dapat memesan dengan smartphone secara cepat dan mudah. Ditengah kesibukan dan kemacetan yang terjadi di perkotaan, transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online tersebut menjadi sarana yang tepat untuk mempermudah dan mempercepat dalam bertransportasi.

Pemerintah Indonesia mengalami banyak kendala dalam mengatasi transportasi online, khususnya dalam permasalahan kali ini ialah transportasi sepeda motor, dimana permasalahan tersebut terletak pada landasan hukumnya. Di Indonesia legalitas dari transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online sering dipertanyakan. Kementerian Perhubungan sempat melarang seluruh transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online untuk beroperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Pelarangan dari Kementerian Perhubungan tersebut menuai banyak kecaman maupun aksi dari berbagai pihak, khususnya pengemudi sepeda motor online. Aksi tersebut berupa protes baik dalam pertemuan maupun demonstrasi. Kemudian terdapat pula 54 pengemudi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online dari bermacam perusahaan menanggapi dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi dalam putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

“...Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbicara tentang angkutan jalan yang mengangkut orang dan/atau barang dengan mendapat bayaran, untuk itu diperlukan suatu kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelaku maupun pengguna angkutan tersebut. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dapat mengatur jenis kendaraan apa saja yang dianggap aman untuk dijadikan kendaraan bermotor umum. Selama sepeda motor tidak dikategorikan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai kendaraan yang aman untuk digunakan menjadi kendaraan umum, sepeda motor hanya dapat berfungsi sebagai kendaraan perseorangan. Demikian tidak bertentangan dengan konstitusi dikarenakan memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kepada setiap warga negara.”<sup>10</sup>

Kementerian Perhubungan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyerahkan pengaturan teknis mengenai transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online kepada masing-masing Kepala Daerah. Situasi menjadi kisruh karena tumpang tindihnya produk hukum yang dikeluarkan Kepala Daerah, dikarenakan tidak jelasnya pengkategorian fungsi

---

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018.



transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online menjadi kendaraan bermotor umum atau bukan, serta Kepala Daerah tidak diberikan panduan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah dalam permasalahan tersebut harus mengambil langkah konkret demi kepastian hukum. Pemerintah juga dalam kedudukannya harus melaksanakan aturan untuk berjalannya sebuah Negara. Disetiap Negara pada dasarnya memiliki aturan atau hukum yang berlaku untuk mengatur segala urusan dalam Negara. “Hukum pada pokoknya adalah produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban berupa larangan, keharusan ataupun kebolehan.”<sup>11</sup>

Regulasi merupakan jalan pemerintah untuk transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, yang di dalamnya mengatur tentang keselamatan, kemitraan, *suspense* mitra *driver* dan biaya jasa atau tarif ojek online pada 11 Maret 2019. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2019 Menteri Perhubungan mengeluarkan keputusan Nomor KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Dalam hal ini Pemerintah terus melakukan

---

<sup>11</sup>Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.7.

upaya dalam regulasi hukum bagi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah merupakan respon dari masyarakat, dimana transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online merupakan alat transportasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia, yang dimana merupakan penunjang dalam perekonomian masyarakat.

Transportasi serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat juga merupakan salah satu pandangan dari Islam. Islam memandang perkembangan teknologi dalam transportasi merupakan salah satu dampak positif dalam kecanggihan.

“...Teknologi yang tepat untuk dipergunakan merupakan salah satu sumber dari ekonomi *syari'ah*. Islam tidak apriori terhadap kehadiran teknologi asalkan digunakan untuk kemakmuran manusia. Islam menentang jika teknologi digunakan untuk mendatangkan kemudharatan bagi umat manusia.”<sup>12</sup>

Dalam al-Qur`an juga dijelaskan bagaimana begitu pentingnya transportasi di kehidupan dalam islam.

Allah swt berfirman:

وَأَيُّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ  
مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai” (Q.S. *Yasin* [36]: 41-42).

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.57.

“Transportasi merupakan hal penting dalam Islam, terutama dalam ekonomi. Ekonomi dalam Islam merupakan konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat.”<sup>13</sup> Ekonomi Islam juga mengatur bagaimana manusia dalam bertransportasi. “Dalam sistem ekonomi, Islam memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang berkah, adil dan sejahtera yang akan meminimalisir kesenjangan ekonomi dan menjauhkan kerusakan pada masyarakat.”<sup>14</sup> Pemerintah sebagai institusi di Indonesia dalam penerapannya harus menyediakan infrastruktur transportasi yang aman dan memadai dengan teknologi terkini. Jika regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengutamakan segi keselamatan, dengan begitu masyarakat tidak akan lagi menjadi korban dari kecelakaan transportasi akibat tidak pedulinya Pemerintah.

Regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah menurut pandangan saya masih membingungkan, dikarenakan terjadinya ketidak pastian hukum tentang fungsi sepeda motor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimana sepeda motor tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor untuk umum. Kemudian dikuatkan dengan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya yang secara implisit berpendapat bahwa

“...Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat mengatur jenis kendaraan apa saja yang dianggap aman untuk dijadikan kendaraan bermotor umum. Selama sepeda motor tidak dikategorikan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai

---

<sup>13</sup>*Ibid.* h.9.

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah ....*, h.32.



kendaraan yang aman untuk digunakan sebagai kendaraan umum maka sepeda motor hanya dapat berfungsi sebagai kendaraan perseorangan.”<sup>15</sup>

Saat ini keberadaan transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online belum memiliki landasan hukum di tingkat Undang-Undang. Langkah yang diambil Kementerian Perhubungan dengan langsung menerbitkan Peraturan terkait transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, menimbulkan resiko timbulnya gugatan uji materiil atas peraturan tersebut kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.”<sup>16</sup>

Peraturan Menteri keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

---

<sup>15</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi 41/PUU-XVI/2018.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1).

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”<sup>17</sup>

Ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Menteri, namun Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”<sup>18</sup>

Data-data tersebut menurut saya substansi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1),”<sup>19</sup> dengan Penjelasan yakni “Penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1).

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (2).

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2).

boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”<sup>20</sup>

Permasalahan selanjutnya merupakan isi dari regulasi tersebut, yang dimana dalam regulasi tersebut memberikan sifat kendaraan bermotor umum kepada kendaraan bermotor yang digunakan untuk perseorangan. Ciri pelayanan juga hampir serupa dengan ciri kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dalam Pasal 152 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Belum adanya sanksi yang diberikan jika melanggar regulasi tersebut. Sifat-sifat tersebut juga belum memenuhi unsur keselamatan, dalam Islam keselamatan dan manfaat khususnya menurut ekonomi *syari'ah*, pembuatan regulasi harus diatur sebagaimana mestinya tanpa melanggar baik itu hukum Islam dan hukum positif. Kesenjangan yang terjadi terhadap regulasi tersebut merupakan alasan utama peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ialah memfokuskan masalah agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memfokuskan untuk meninjau kesesuaian regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP

---

<sup>20</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (2).



348 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta meninjau regulasi terhadap transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online dengan menggunakan *siyasah dusturiyyah* dan kaidah hukum Islam dengan sumber al-Qur`an, Hadits, *Ijma'* serta *Qiyas*.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

“Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah-masalah dan meningkatkan daya nalar untuk mencari jawaban melalui penelitian.”<sup>21</sup> Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjajaki regulasi terhadap transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.
2. Untuk menerangkan tinjauan hukum Islam terhadap regulasi hukum transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi Penelitian merupakan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Terdapat 2 jenis manfaat dalam penelitian ini, yakni :

---

<sup>21</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.9.

### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis pribadi maupun pembaca dalam mengetahui permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai wawasan dan ilmu bagi peneliti untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.”<sup>22</sup> Metode dalam penelitian merupakan salah satu hal esensi, karena dengan metode peneliti dapat memperlancar penelitiannya.

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. “Metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan uraian kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berperilaku mengamati.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h.2.

<sup>23</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.3.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). “Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data.”<sup>24</sup> Dalam suatu penelitian perlu ditentukan cara-cara tertentu agar dalam pelaksanaan penelitian mendapatkan hasil yang maksimal, terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam metode penelitian, yaitu :

#### 1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

“Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif.”<sup>25</sup>

Penulis akan menerangkan melalui logika alamiah, penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika tinjauan regulasi sepeda motor berbasis aplikasi online.

#### 2. Desain penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian studi kasus.

---

<sup>24</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.10.

<sup>25</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.5.

“Studi kasus bertujuan mengeksplorasi secara mendalam suatu program, kejadian atau aktifitas, proses atau seorang individu atau lebih. Kasus yang diteliti terikat dengan waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu tertentu.”<sup>26</sup>

Penulis memilih desain penelitian studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online dengan berbagai metode pengumpulan data secara detail, serta regulasi transportasi sepeda motor merupakan kasus yang berkaitan dengan aktifitas.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi.

“Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian.”<sup>27</sup> Terdapat 2 macam sumber dalam pengumpulan data, yakni :

#### a. Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.”<sup>28</sup>

Data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur`an, Hadits, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>26</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.15.

<sup>27</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, -cet.4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.236.

<sup>28</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.81.



Tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019.

b. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.”<sup>29</sup> Dalam data-data sekunder, peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, majalah, skripsi, makalah, karya tulis ilmiah, media online dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

4. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Deskriptif Analitik*. “*Deskriptif Analitik* yakni cara menganalisa dan interpretasi objek data penelitian dengan memaparkan beberapa data sehingga memperoleh kesimpulan.”<sup>30</sup> *Deskriptif Analitik* dalam penelitian ini nantiya akan memberikan deskripsi atau gambaran hukum Islam dalam meninjau regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.

Dalam menganalisis data ini menggunakan metode deduktif. “Metode deduktif merupakan metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.”<sup>31</sup> Dengan metode deduktif peneliti dapat menspesifikasi keterangan-keterangan dari data yang diperoleh agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang tinjauan hukum Islam tentang

---

<sup>29</sup>*Ibid.* h.38.

<sup>30</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), h.139.

<sup>31</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.42.

transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. Terdapat 2 cara dalam menganalisis data, yaitu :

a. Penandaan Data (*Koding*)

“Penandaan data memegang peranan penting dalam proses analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian.”<sup>32</sup>

Peneliti nantinya akan memberi tanda atau catatan data yang menyatakan sumber dan jenis data yang baik, yang bersumber dari sumber-sumber hukum Islam ataupun buku-buku yang sesuai dengan permasalahan dalam meninjau hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.

b. Pengelompokan Data (*Organising*)

“Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.”<sup>33</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mengatur dan menyesuaikan data yang didapat dalam meninjau hukum Islam tentang regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online agar menghasilkan dasar pemikiran yang teratur.

---

<sup>32</sup>Wordpress, “Coding: Sebuah Proses Penting Dalam Penelitian Kualitatif” (On-line) tersedia di : <https://josephrdaniel.wordpress.com/2013/08/16/coding-sebuah-proses-penting-dalam-penelitian-kualitatif/> (3 Juli 2019).

<sup>33</sup>Jhonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.154.

c. Pemeriksaan Data (*Editing*)

“Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.”<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online yang telah terkumpul agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



---

<sup>34</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian ....*, h.115.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Siyāsah Dusturiyah*

###### a. Pengertian *Siyāsah Dusturiyah*

“...*Siyāsah* artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Arti tersebut memiliki sinyal bahwa tujuan *siyāsah* ialah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan untuk hal yang bersifat politis.”<sup>35</sup> Mengatur, mengurus, memerintah serta memimpin dalam *siyāsah* tidak terlepas dari kata kemaslahatan yang terkandung didalamnya serta didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam. Namun *fiqh siyāsah* terdapat beberapa bagian yang salah satunya adalah *siyāsah dusturiyah*.

“*Siyāsah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura'* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.”<sup>36</sup>

Awal mula kata *siyāsah dusturiyah* dalam sejarahnya merupakan sebuah kata dari kajian

---

<sup>35</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia, 2014), h. 3.

<sup>36</sup>*Ibid.* h.177.

“...*Fiqh siyāsah* dalam pembahasannya menyebut konstitusi dengan kata *dusturi*, yang dimana kata tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik serta agama, namun setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata tersebut berkembang dalam pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan.”<sup>37</sup>

“Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan Perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.”<sup>38</sup> Dapat disimpulkan

bahwa *siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dengan masyarakat ataupun lembaga-lembaganya yang mengurus, mengatur serta merumuskan Perundang-undangan yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam yang terdapat disuatu wilayah. *Siyāsah dusturiyah* lebih mengkaji kepada Pengaturan dan Peraturan Perundang-undangan.

#### b. Ruang Lingkup *Siyāsah Dusturiyah*

Memahami *siyāsah dusturiyah* terdapat bidang-bidang serta cakupan-cakupan dalam konsep maupun teorinya.

“*Siyāsah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat al-Qur`an maupun hadits, *maqosidu syar’iah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.”

---

<sup>37</sup>*Ibid.* h.177-178.

<sup>38</sup>*Ibid.* h.3.



“Dalil *Kulli* adalah dalil *syar’i* yang masing-masingnya menunjuk kepada satuan atau hukum yang bersifat menyeluruh. Dalil *kulli* adakalanya berupa Al-Kitab atau Hadits, yaitu ayat-ayat atau Hadits yang bersifat umum.”<sup>39</sup>

Terdapat bidang-bidang dalam kajian *Siyāsah Dusturiyah* sebagai berikut:

1) *Al-sulthah al-tasyri’iyah*

“Dalam kaidah *ushul fiqh* kaidah *tasyri’iyah* adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar *syara’* dalam menetapkan hukum,”<sup>40</sup> sementara “*al-sulthah al-tasyri’iyah* yaitu kekuasaan Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum,”<sup>41</sup> dengan kata lain yaitu salah satu kewenangan atau kekuasaan Pemerintah Islam untuk mengatur terhadap persoalan yang menyangkut tentang kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*.

“...Undang-Undang serta Peraturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif, harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam syari’at Islam. Terdapat dua fungsi lembaga legislatif sebagai berikut :

- a) Hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Qur’an dan Sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri’iyah* adalah Undang-Undang Ilahiyah yang diisyaratkan oleh Allah Swt serta dijelaskan oleh Nabi Saw dalam Hadits.
- b) Melakukan *Ijtihad* terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Dalam hal ini

---

<sup>39</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h.159.

<sup>40</sup>*Ibid*, h.147.

<sup>41</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam ....*, h.187.

lembaga legislatif berusaha mencari *Illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul. Lembaga legislatif juga harus mengacu kepada *ijtihad* yang dimana perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi social masyarakat, sehingga hasil peraturan tersebut sesuai pula dengan aspirasi masyarakat sehingga tidak memberatkan mereka.”<sup>42</sup>

*al-sulthah al-tasyri'iyah* mengeluarkan Peraturan, namun tidak berlaku untuk selamanya, dikarenakan perkembangan yang terjadi baik perkembangan zaman maupun masyarakat sehingga sewaktu-waktu peraturan tersebut dapat berubah dan lembaga tersebut dapat menentukan Peraturan yang baru.

Terdapat unsur-unsur legislasi dalam Islam sebagai berikut :

- “a). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.”

## 2) *Al-sulthah Tanfidziyyah*

*Al-sulthah tanfidiyah* adalah kekuasaan eksekutif yang di dalamnya membahas tentang persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Islam tidak menjelaskan secara jelas tentang lembaga-lembaga yang berada di bawah Presiden atau Kepala Daerah. Menurut Sumber hukum Islam diperintahkan untuk menaati perintah dari lembaga eksekutif sebagai *ulil amri*, namun dengan syarat lembaga eksekutif tidak lepas dari ketaatannya terhadap al-Qur`an dan Hadits.

---

<sup>42</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam ....*, h.189.

### 3) *Al-sulthah Qadlaihah*

*Al-sulthah qadlaihah* adalah kekuasaan yudikatif yang didalamnya membahas mengenai permasalahan-permasalahan dalam peradilan baik perkara-perkara pidana yang contohnya seperti penganiayaan, mengambil hak dari orang lain, perampokan serta perkara lain yang masuk dalam peradilan.

### 4) *Al-sulthah Idariyah*

*Al-sulthah Idariyah* adalah bidang yang didalamnya membahas mengenai masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ruang lingkup di atas merupakan bagian-bagian dari *siyāsah dusturiyah*, yang di dalamnya juga menjelaskan bagaimana Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia termasuk dalam ketatanegaraan.

“...Sistem pemerintahan, dalam Islam mencerminkan seperti dalam ruang lingkup *siyāsah dusturiyah* di atas juga mengatur tentang konsep *imamah* yang mengatur tentang hak dan keadilan baik pemimpin maupun rakyat, yang dihubungkan dengan Peraturan dasar tentang bentuk dan batasan pemerintahan, cara pemilihan pemimpin, serta hubungan penguasa dan rakyat. Kemudian ruang lingkup pembahasan *siyāsah dusturiyah* juga membahas *bai'at*, yang menjelaskan tentang perjanjian dengan substansi Pemerintahan. Kemudian membahas tentang *'ahlul halli wal aqd*, yakni perwakilan dalam Pemerintahan serta *wazarah* yang membantu memikul beban Pemerintahan yang harus diemban oleh seorang pemimpin.”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.40-41.

### c. Sumber Hukum *Siyāsah Dusturiyah*

Pada prinsipnya al-Qur`an dan Hadits merupakan sumber utama dalam hukum Islam.

“Tetapi dalam kenyataannya bahwa kemampuan manusia sangat terbatas untuk menangkap semua pesan yang terdapat dalam kandungan *nash* secara pasti, baik al-Qur`an maupun Hadits itu sendiri. Dengan keterbatasan itu, dirasakan adanya tindakan, kasus, atau peristiwa-peristiwa hukum yang secara pasti hukumnya tidak ditemui pada dua sumber tadi. Oleh karenanya *fuqaha* umumnya sepakat menjadikan *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber ketiga dan keempat setelah al-Qur`an dan Hadits. Empat sumber inilah yang disepakati oleh banyak ulama sebagai sumber-sumber *fiqh* Islam.”<sup>44</sup>

Berdasarkan pada *nash* al-Qur`an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam terdapat beberapa petunjuk mengenai sumber hukum Islam. Diantaranya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾


Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. *An-Nisa'* [4]: 59).

Ayat ini menjelaskan untuk menaati Allah Swt dan Rasul-Nya dengan beracuan kepada al-Qur`an dan Hadits.

<sup>44</sup>Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* ...., h.67.

“Sedangkan perintah untuk mentaati *Ulil Amri* atau pemerintah Penguasa merupakan perintah untuk mengikuti keesepakatan lembaga hukum pemerintah sebagai *ijma'*, dan perintah untuk mengembalikan masalah kepada Allah dan *Rasul-Nya* itu merupakan perintah untuk mengembalikan ketetapan hukum yang terkandung dalam hal yang diperselisihkan hukumnya kepada makna cakupan al-Qur`an dan hadits dengan menerapkan teori *Qiyas*.”<sup>45</sup>

Penjelasan ayat tersebut di dalamnya terdapat pula teori hierarki hukum dalam Islam seperti yang diatur dalam sumber hukum Islam. Sebagian besar pendapat ulama ilmu *fiqh* sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah al-Qur`an dan Hadist. Dalam ayat lain Allah swt berfirman:



لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Q.S. *Al-Hadid* [57] : 25).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *Rasulullah* saw juga mempunyai tugas yaitu menyampaikan hukum-hukum Allah, dan banyak lagi ayat-ayat dalam al-Qur`an yang menjelaskan mengenai peraturan.

---

<sup>45</sup>Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* ...., h.15.



Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum islam yaitu : *ijma'*, *ijtihad*, *istishab*, *istislah*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *qiyas*, *ray'yu*, dan *'urf*. Berikut Penulis jabarkan Sumber-sumber hukum *Siyasah Dusturiyah*.

### 1) al-Qur`an

Pedoman umat Islam merupakan al-Qur`an, yang dimana telah menjadi sumber hukum yang paling utama dalam menentukan segala sesuatu.

“al-Qur`an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan *syari'at* Islam. Secara istilah yang dimaksudkan dengan sebutan al-Qur`an itu adalah firman Allah Swt berupa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw.”<sup>46</sup>

Hal ini ditegaskan di dalam al-Qur`an sebagai berikut.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ  
وَلَا تَكُنْ لِلْآثِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menu nkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S *An-Nisa'* [4] : 105).

al-Qur`an merupakan sumber utama dari *Siyāsah dusturiyah* sebagai rujukan dan menetapkan Peraturan-peraturan.

---

<sup>46</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan ....*, h.14.

## 2) Hadits

Hadits merupakan sumber kedua dalam *Siyāsah dusturiyah* setelah al-Qur`an, yang dimana dalam penjelasannya yaitu

“Hadist merupakan ucapan *Rasulullah* Saw tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau dapat disebut dengan sunnah *qauliyyah*. Hadist merupakan bagian dari sunnah *Rasulullah*. Secara istilah *syara'* yang dimaksudkan dengan sunnah itu adalah apa saja yang muncul dari *Rasulullah* Muhammad Saw baik berupa perkataan atau perbuatan maupun ketetapan.”<sup>47</sup>

## 3) *Ijma'*

*Ijma'* merupakan sumber ketiga setelah al-Qur`an dan Hadits dalam pembahasan *Siyāsah dusturiyah*. Dalam penjelasannya *Ijma'*

“Secara bahasa mengandung dua pengertian sebagai berikut :

- a) Yaitu niat dan kehendak untuk sesuatu.
- b) Kesepakatan terhadap suatu hal.”<sup>48</sup>

“...*Ijma'* menurut hukum Islam adalah kesepakatan sejumlah *mujtahid* umat Islam setelah masa *Rasulullah* Saw tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan *syari'at* atau peristiwa tertentu.”<sup>49</sup>

## 4) *Qiyas*

Sumber hukum *Siyāsah dusturiyah* selanjutnya adalah *Qiyas*.

“*Qiyas* diartikan sebagai upaya menghubungkan atau menyamakan hukum dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam *nash* dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya disebutkan oleh *nash*.

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.* h.15.

<sup>49</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* ...., h.78.

Penyamaan hukum tersebut didasarkan atas kesamaan *illat* antara dua peristiwa yang bersangkutan.”<sup>50</sup>

Terdapat tiga hakikat dalam *qiyas* adalah:

- a) Ada dua kasus yang mempunyai ‘*illat* yang sama.
- b) Satu di antara dua kasus yang bersamaan ‘*illat*-nya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan *nash*, sedangkan kasus yang satunya lagi belum diketahui hukumnya.
- c) Berdasarkan ‘*illah* yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada *nash*nya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan *nash*.

#### 5) Adat Kebiasaan Bangsa Yang Tidak Bertentangan Dengan Prinsip al-Qur`an dan Hadits.

Adat kebiasaan yang terdapat didalam suatu bangsa banyak yang sejalan dengan al-Qur`an dan Hadits tetapi ada pula yang bertentangan, sehingga dapat diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis. “...Tetapi ada pula kemungkinan adat kebiasaan yang tidak tertulis, adat kebiasaan ini biasanya disebut dengan konversi.”<sup>51</sup>

Untuk itu, adat kebiasaan merupakan salah satu hukum yang harus diperhatikan dalam kajian *Siyāsah dusturiyah*.

Menurut penjelasan tersebut penulis memilih *Siyāsah dusturiyah* sebagai teori dalam penelitian ini, dikarenakan dalam *Siyāsah dusturiyah*

<sup>50</sup>*Ibid*, h.84.

<sup>51</sup>Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), h.157.

menjelaskan dan membahas tentang politik Perundang-undangan. Lebih jelasnya penulis memakai *Siyāṣah dusturiyah* sebagai pengkajian terhadap diduganya bertentangan regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online dengan Peraturan yang berada di atasnya namun tetap menggunakan sumber hukum Islam yakni al-Qur`an, hadits, *ijma'*, *Qiyas* maupun adat kebiasaan bangsa sebagai dasar dan sumber dari teori yang penulis pakai.

## 2. *Maslahah al-Mursalah*

### a. Pengertian *Maslahah al-Mursalah*

“Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Pemeliharaan tujuan *syara'* yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-Kulliyat al-Khams*.”<sup>52</sup> Terdapat pula pendapat-pendapat lain tentang pengertian *maslahah al-mursalah* yang dimana inti dari pengertian itu adalah memelihara agar tercapainya segala tujuan *syara'*, yakni menolak kemudharatan dan mendapatkan kemanfaatan.

### b. Syarat-syarat *Maslahah al-Mursalah*

#### 1) Sesuatu yang dianggap *Maslahah al-Mursalah* bersifat hakiki.

“Maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaannya, sebab tujuan pensyari'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk

---

<sup>52</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Bestari Buana Murni Group, 2004), h.81-82.

mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan,”<sup>53</sup>

“bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.”<sup>54</sup>

2) “Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu.”<sup>55</sup>

3) “Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur`an atau sunnah Rasulullah Saw atau bertentangan dengan *ijma*’,”<sup>56</sup> dengan kata lain, kemaslahatan itu sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan *syar’i*.

#### c. Macam-macam Masalahah al-Mursalah

1) “*Maslahah* yang *mu’tabaroh* atau masalah yang diakui oleh *syara*’, merupakan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam serta *Nash* telah mengakuinya.”<sup>57</sup> “Sebagian ulama *ushul fiqh* menyebutnya dengan *Maslahah Dhoruriyah*, yakni kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam rangka memelihara kebaikan, ketertiban serta manfaat bagi kehidupan manusia.”<sup>58</sup>

Definisi tersebut sesuai dengan tujuan hakiki hukum Islam.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h.93.

<sup>54</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), h.152-153.

<sup>55</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh* ....., h. 93.

<sup>56</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih* ....., h. 152-153

<sup>57</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh* ....., h.84.

<sup>58</sup> Poernomo Hadi Syaechul, *Dinamisasi Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Demak: Demak Perss, 2002), h.15.



- 2) “*Maslahah yang Mulghoh* atau *Maslahah Ghairu Mu’tabaroh* ataupun *Al-Munasib Al-Mulgho* yang artinya adalah kemaslahatan yang tidak diakui serta tidak dibenarkan oleh *syara’*.”<sup>59</sup> “Sifat kemaslahatan yang kelihatannya secara lahiriyah dapat merealisasikan kemaslahatan, namun *syara’* melarangnya.”<sup>60</sup>
- 3) “*Maslahah Mursalah* atau *Maslahah Mutlaqoh* ataupun *Munasib Mursalah*, merupakan sifat kemaslahatan yang tidak diketahui apakah diakui atau dibatalkan oleh *syara’*, baik melalui al-Qur`an, sunnah ataupun *ijma’*.”<sup>61</sup> Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehan *illat* hukum dan dalil hukum atau tidak.

d. Kedudukan Masalahah al-Mursalah Dalam Hukum Islam

*Kehujjahan* terhadap *masalahah al-mursalah* pada prinsipnya ulama menerimanya sebagai alasan dalam menetapkan hukum *syara’*, baik dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

“Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *masalahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *masalahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Ada ayat, hadits atau *ijma’* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘*illat* dalam penetapan suatu hukum.”<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh* ...., h. 85.

<sup>61</sup>Poernomo Hadi Syaechul, *Dinamisasi Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman*.....,

h. 15.

<sup>62</sup>*Ibid.*

“..Ulama Malikiyyah menerima *masalah al-mursal* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama *fiqh* yang paling banyak dan luas menerapkannya. Malikiyyah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti
- 3) Bukan sekedar perkiraan.”<sup>63</sup>

Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah al-mursal*

itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak *kemudharatan*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ulama golongan Syafi'iyyah, menjadikan *masalah* sebagai dalil *syara'*, namun Imam Syafi'i, memasukkannya ke dalam *qiyas*.

“Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam *mengistinbatkan* hukum, yaitu:

- 1) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*
- 2) *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*.
- 3) *Maslahah* itu termasuk kedalam kategori *masalah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.”<sup>64</sup>

Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila *syari'at* Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

### 3. Transportasi Menurut Islam

Terdapat beberapa alat transportasi yang disebut dalam al-Qur`an seperti kapal dan binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, keledai atau selainnya. Ketentuan yang dijelaskan oleh al-Qur`an terhadap transportasi salah satunya adalah *rakiba* yang berarti menaiki kendaraan. Dalam al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang transportasi sebagai berikut.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ  
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ  
مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ  
الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Q.S *Al-Baqarah* [2] : 164).

“...Ayat tersebut menjelaskan bagaimana transportasi khususnya dilaut bahwa Allah tundukan laut agar bisa membawa berlayar perahu-perahu yang berada diatasnya, tidak membuat perahu tenggelam, sekalipun dengan membawa beban yang berat. Perahu-perahu tersebut berlayar dari satu pantai ke pantai yang lain membawa barang-barang yang akan dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian Allah menjadikan laut sebagai jalur transportasi manusia

dengan manfaat untuk mobilitas baik barang-barang kebutuhan untuk mereka.”<sup>65</sup>

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾  
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى  
الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya : “Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera” (Q.S *Al-Mu'min* [40] : 79-80).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa selain untuk dimakan binatang

juga dapat dijadikan alat transportasi selain itu terdapat penjelasan tentang

transportasi di darat maupun di laut. Kemudian terdapat pula ayat al-

Qur'an yang menjelaskan tentang transportasi terdahulu hingga

transportasi yang akan datang, seperti yang terdapat pada ayat berikut :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.” (Q.S *An-Nahl* [16] : 8).

Ayat tersebut secara spesifik menyebutkan binatang-binatang

sebagai transportasi yakni kuda, bagal<sup>66</sup> dan keledai. Tetapi dijelaskan pula

pada akhir ayat bahwa Allah menciptakan apa yang tidak diketahui

<sup>65</sup>Tafsir Web “Surat Al-Baqarah Ayat 164” (On-Line) Tersedia di :  
<https://tafsirweb.com/642-surat-al-baqarah-ayat-164.html>. (10 Oktober 2019).

<sup>66</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* ...., h.116. Demikianlah memberi pengertian bahwa Bagal adalah keturunan kuda jantan dengan kuda betina.

manusia yang menjadi isyarat jika pada masa yang akan datang akan lahirnya transportasi dengan berbagai model, bentuk hingga kecanggihannya seperti yang dapat kita rasakan pada zaman ini.

Selain dalam al-Qur`an terdapat sebuah Hadits yang meriwayatkan tentang akan adanya kemajuan teknologi transportasi sebagai berikut.

ثُمَّ أُتِيَتْ بِدَابَّةٍ أبيضَ يُقَالُ لَهُ الْبَرَّاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ  
يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا  
السَّمَاءَ الدُّنْيَا

Artinya : “Kemudian aku didatangi binatang yang disebut *Buroq*, yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari *Baghol*, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku dibawa di atasnya, kemudian kami pergi hingga kami mendatangi langit dunia.” (HR. Ahmad, Al-Bukhori, Muslim dan lain-lain).

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa akan terdapat kemajuan transportasi dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga saat ini banyak bermunculan alat transportasi yang canggih seiring dengan majunya globalisasi yang ada di dunia ini. Walaupun pada zaman *Rasulullah* Saw hewan masih jadi prioritas dalam bertransportasi.

Pada zaman *Rasulullah* Saw yang digunakan sebagai kendaraan utama ialah unta, karena unta memiliki tenaga yang cukup kuat dan dapat berjalan jauh. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia semakin meningkat maka pada abad ke 20 terciptalah transportasi yang canggih yakni mobil, sepeda motor, kapal laut, kereta api hingga



pesawat terbang yang dimana perkembangan alat transportasi tersebut telah dijelaskan oleh Allah Swt 14 abad yang lalu.

Tujuan diciptakannya transportasi menurut al-Qur`an ialah untuk menjadi tunggangan dan hiasan. Benar saja, pada zaman ini banyak orang yang menjadikan kendaraan bukan hanya untuk ditunggangi, tetapi juga untuk dijadikan koleksi dan hiasan seperti kendaraan-kendaraan mewah. Di zaman dahulu juga banyak manusia membeli kuda terbaik untuk dibanggakan dan dijadikan hiasan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Sarana dalam mewujudkan pembangunan hukum Nasional ialah dengan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang didukung oleh metode-metode yang sesuai dengan aturan dan melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat Peraturan Perundang-undangan.

“Kata pembentukan Undang-Undang merupakan rangkaian kata yang diartikan sebagai proses pembuatan Undang-Undang yang kerangkanya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, serta penyebarluasan. Secara terpisah, kata pembentukan juga diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membentuk.”<sup>67</sup>

Telah terjadi beberapa kali perubahan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan yang terakhir yakni hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

---

<sup>67</sup>Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h.15.

“Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.”<sup>68</sup>

Selanjutnya terdapat peraturan selain dyang disebutkan oleh pasal 7

ayat (1), yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menegaskan sebagai berikut :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”<sup>69</sup>

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 menegaskan tentang Peraturan yang telah dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) sebagaimana berikut:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>69</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1).

<sup>70</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (2).

Jika kita melihat dari Peraturan tersebut, maka terdapat dua syarat untuk Peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, sebagai berikut :

- a. Diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jika kita merujuk kedalam doktrin, maka kita hanya mengenal 2 macam Peraturan Perundang-undangan yang dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atas dasar sebagai berikut :

- a. Atribusi pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Delegasi pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“...Atribusi kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat diartikan sebagai penciptaan wewenang oleh konstitusi dan pembentuk Undang-Undang yang diberikan kepada suatu bagian Negara, baik yang telah ada maupun yang dibentuk baru. Delegasi dalam bidang Peraturan Perundang-undangan merupakan pemindahan atau penyerahan kewenangan untuk membentuk Peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberikan delegasi kepada yang menerima delegasi dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut terhadap *delegataris* sendiri, sedangkan tanggungjawab *delegans* sangat terbatas sekali.”<sup>71</sup>

Selain itu dasar terbentuknya Peraturan Perundang-undangan terdapat pula pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yakni, “Asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur

---

<sup>71</sup>Maria Farida Indrati S, dari *Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta : Kanisius. 2007), h.347.

pembentukan yang telah ditentukan.”<sup>72</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 disebutkan bahwa :

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.”<sup>73</sup>

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak terlepas dari asas-asas dalam nilai yang terkandung didalam Peraturan tersebut sebagai tumpuan untuk berfikir, berpendapat serta bertindak. Selain itu asas pula berperan sebagai acuan agar terhindar dari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. asas-asas juga dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan sebagai berikut :

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik ....*, h.23.

<sup>73</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5

Asas-asas tersebut merupakan dasar terbentuknya Peraturan Perundang-undangan agar rumusan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan tidak terdapat kekeliruan dalam merumuskannya.

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan tinjauan penelitian tentang regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul tersebut.

1. Penelitian pertama yang penulis temukan merupakan penelitian dari Bagus Aditya (2019) yang penelitiannya berjudul “Payung Hukum Semu Ojek Online” penelitian ini mendeskripsikan tentang

“...Regulasi ojek online yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memberikan status hukum yang jelas bagi ojek online, yang bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, yang kemudian ditanggapi oleh Kementerian Perhubungan dengan menyerahkan pengaturan teknis mengenai ojek online kepada masing-masing kepala Daerah. Dengan itu situasi semakin kisruh dengan munculnya produk-produk hukum daerah terkait ojek online yang tidak seragam karena kepala daerah tidak diberikan panduan oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian terbentuknya regulasi ojek online yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019.”<sup>75</sup>

Perbedaan penelitian tersebut ialah dari hasil penelitian yang yang berisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, perumus peraturan berusaha menghindari penggunaan istilah kendaraan bermotor umum, angkutan umum atau angkutan orang. Kemudian dalam peraturan tersebut dan Keputusan Menteri Perhuungan Nomor 384 Tahun 2019,

---

<sup>74</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 ayat (1).

<sup>75</sup>Bagus Aditya, “Payung Hukum Semu Ojek Online”. *Hukum Online*, 06 Mei 2019.

tidak memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai operasional transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online. Kemudian yang terakhir, tindakan Kementerian Perhubungan saat ini dengan langsung menerbitkan Peraturan Menteri terkait transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online menimbulkan resiko timbulnya gugatan uji materiil atas peraturan tersebut ke Mahkamah Agung. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kerancuan dan pertentangan dalam regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online, tetapi dalam penelitian yang penulis rangkai lebih menjurus kepada pandangan hukum Islam terhadap regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online tersebut.

2. Penelitian kedua yang penulis temukan ialah penelitian yang dilakukan oleh Kamilina Khidmati (2018) dengan judul “Kebijakan Transportasi Online Prespektif *Fiqh Siyasah*”. Penelitian ini menjelaskan tentang

“...Bagaimana kebijakan-kebijakan yang pemerintah ambil seperti badan hukum yang tercantum dalam regulasi taksi online, kemudian pembatasan kuota dalam transportasi online tersebut, sertifikasi registrasi uji tipe dan keamanan serta tarif dalam transportasi online. Semua ditinjau menurut maslahatnya.”<sup>76</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan pada hasil penelitiannya, hasil penelitian diatas menjelaskan bagaimana maslahat yang dari keluarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari segi keamanan, tarif hingga pembatasan kuota pada transportasi online tersebut. Kemudian penelitian tersebut lebih

---

<sup>76</sup>Kamilina Khidmati, “Kebijakan Transportasi Online Prespektif *Fiqh Siyasah*” (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).



cenderung menjelaskan tentang taksi online dan regulasinya sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan lebih fokus kepada transportasi sepeda motor dan regulasi transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online yang bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

3. Penelitian ketiga yang penulis temukan ialah penelitian dari Luthfi Al Haris (2016) dengan judul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ojek”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang

“...Perlindungan konsumen dan pengemudi yang dimana terdapat tanggung jawab ketika terjadinya transaksi serta pengangkutan yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, seperti pada transportasi online dengan memberikan asuransi kepada konsumen bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pengoperasian transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online ini yang belum jelas seperti regulasi yang mengatur.”<sup>77</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan ialah, penelitian tersebut lebih menjelaskan perlindungan konsumen ketika dalam pengangkutan dan terpenuhinya hak-hak baik itu konsumen maupun pengemudi, kemudian penelitian yang saya lakukan lebih menjelaskan kepada regulasi yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, namun sama-sama menjelaskan bagaimana operasional transportasi sepeda motor berbasis aplikasi online.

---

<sup>77</sup>Luthfi Al Haris, “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Ojek”. (Skripsi Program Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).